

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2025



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**
JL. Surohadikusumo No. 1 — Pemalang
©2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
 BAB II EVALUASI RENCANA KERJA BKD KABUPATEN PEMALANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	 II-1
2.1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I	 II-1
2.2. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025	II-7
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	II-7
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	II-8
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	II-9
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	II-9
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	II-9
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	II-10
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	II-11
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	II-11
B. Program Kepegawaian Daerah	II-12
1. Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	II-13
2. Mutasi dan Promosi ASN	II-14
3. Pengembangan kompetensi ASN	II-15
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	II-16
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis BKD Kabupaten Pemalang	II-22
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKD KABUPATEN PEMALANG	 III-1
3.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	III-1
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	III-1
B. Program Kepegawaian	III-2
 BAB IV PENUTUP	 IV-1
4.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian	IV-1
4.2. Kaidah- Kaidah Pelaksanaan	IV-1
4.3. Rencana Tindak Lanjut	IV-1

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pemalang dibanding Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar Tahun 2022-2024 ...	II-1
Tabel 2.2	Status Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025	II-5
Tabel 2.3	Capaian Kinerja BKD Kabupaten Pemalang Hingga Triwulan I Tahun 2025	II-6
Tabel 2.4	Status Capaian Kinerja dan Anggaran	II-7
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2025 Triwulan I Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.....	II-8
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2025 Triwulan I Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	II-9
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2025 Triwulan I Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	II-9
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2025 Triwulan I Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	II-10
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2024 Triwulan I Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	II-10
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2025 Triwulan I Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	II-11
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2025 Triwulan I Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	II-12
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2025 Triwulan I Kegiatan Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	II-14
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2025 Triwulan I Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	II-15
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2025 Triwulan I Kegiatan Pengembangan kompetensi ASN	II-16
Tabel 2.15	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2025 Triwulan I Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	II-17
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I	II-18
Tabel 2.17	Pemetaan Permasalahan Pelayanan BKD Kabupaten Pemalang ...	II-22
Tabel 3.1	Rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2025	III-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025	I-2
------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----

“Y. PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025”

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan permasalahan dan isu strategis yang ada. Dinamika kondisi perekonomian dan adanya kebijakan daerah yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu disesuaikan. Untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan dengan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden perlu untuk dilakukan penyesuaian pada perencanaan pembangunan daerah melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan pada perencanaan pembangunan perangkat daerah melalui perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Perubahan Renja tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Adapun perubahan Renja Tahun 2025 perlu disusun karena :

1. Adanya penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2025;
2. Adanya penambahan sub kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2025; dan
3. Adanya penyesuaian target kinerja di Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

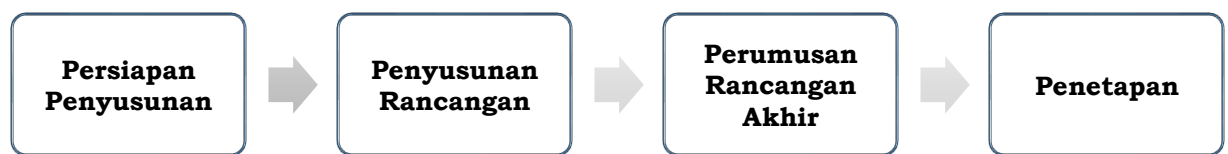
Dengan dilantikannya Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang diselenggarakan pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2025 maka pembangunan Kabupaten Pemalang periode 2025-2029 segera dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025. BKD Kabupaten Pemalang segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan perangkat daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan Renja Tahun 2025. Adapun prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 diarahkan pada “Percepatan Pembangunan melalui Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Inovasi dan Teknologi untuk Meningkatkan Perekonomian dan Daya Saing Daerah.”

Perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
 - Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang tahun 2025;
 - Pengumpulan materi (hasil evaluasi capaian Renja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dan perubahan RKPD Tahun 2025).

2. Penyusunan rancangan
 - Koordinasi dengan Bidang-bidang dan UPT Penilaian Kompetensi;
 - Desk dengan pengampu kegiatan;
 - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025.
3. Perumusan rancangan akhir
 - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
 - Diverifikasi oleh Bappeda.
4. Penetapan
 - Bersama dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025



1.2. Landasan Hukum

Perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Strategis (Renstra) BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026; Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025; Perubahan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 serta Surat Edaran Bupati Pemalang Nomor : 100.3/760/Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Secara rinci dasar hukum penyusunan Perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Belanja Negara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah\9-221/2024);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang;
33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 12);
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 14);
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 12);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menyediakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam penyusunan perubahan RKA BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025. Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di BKD Kabupaten Pemalang.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat :

- Latar belakang perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang, termasuk alasan dan tujuan perubahan.
- Landasan hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang mendasari perubahan.
- Maksud dan tujuan penyusunan perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang.
- Sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA BKD KABUPATEN PEMALANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, faktor-faktor penyebab program/kegiatan/sub kegiatan dengan status capaian kinerja sangat rendah dan rendah.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKD KABUPATEN PEMALANG

Memuat kegiatan lanjutan tahun berjalan, penambahan sub kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta pagu indikatif yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV : PENUTUP

Memuat rencana tindak lanjut perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA BKD KABUPATEN PEMALANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I

BKD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah. BKD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Sedangkan fungsi BKD adalah perumusan kebijakan di bidang jabatan dan penilaian kinerja, mutasi dan pembinaan serta pengembangan aparatur; pelaksanaan kebijakan di bidang jabatan dan penilaian kinerja, mutasi dan pembinaan serta pengembangan aparatur; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jabatan dan penilaian kinerja, mutasi dan pembinaan serta pengembangan aparatur; pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja BKD Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2022-2024 sebagai berikut :

a. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)

IP ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. IP ASN Kabupaten Pemalang tahun 2022 sebesar 51,63 (sangat rendah), di tahun 2023 meningkat menjadi 65,53 (rendah) dan meningkat pula di tahun 2024 menjadi 78,28 (sedang). Peningkatan tersebut menandakan meningkatnya kualitas ASN Kabupaten Pemalang.

Rata-rata IP ASN Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2022-2024 sebesar 65,15 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata IP ASN Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,28. Namun, apabila dibandingkan dengan rata-rata IP ASN 5 (lima) kabupaten sekitar sebesar 63,46, IP ASN Kabupaten Pemalang lebih tinggi. Namun demikian, di tahun 2024 IP ASN Kabupaten Pemalang hanya unggul dibandingkan Kabupaten Pekalongan, sehingga dibutuhkan upaya keras dari Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan IP ASN di tahun-tahun mendatang. Perbandingan IP ASN Kabupaten Pemalang dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pemalang dibanding Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar Tahun 2022-2024

No	Tahun	Indeks Profesionalitas ASN							
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata Kab sekitar	Pemalang	Prov Jateng
1	2022	54,94	46,13	43,87	40,94	47,42	46,66	51,63	54,46
2	2023	72,64	70,34	67,35	65,91	47,98	64,84	65,53	61,46
3	2024	79,49	79,38	80,76	79,45	75,25	78,87	78,28	82,93
Rata-rata		69,02	65,28	63,99	62,10	56,88	63,46	65,15	66,28

Sumber: IP ASN BKN, 2022, 2023 dan 2024

Walaupun IP ASN Kabupaten Pemalang di tahun 2024 sudah melebihi target yang telah ditetapkan, namun lebih rendah dibandingkan IP ASN Provinsi Jawa Tengah dan 4 (empat) kabupaten sekitar, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan dimensi-dimensi Indeks Profesionalitas ASN yaitu kompetensi, kinerja, kualifikasi dan kedisiplinan.

b. Persentase kompetensi ASN

Dimensi yang pertama yaitu Kompetensi yang diukur dengan indikator persentase kompetensi ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2022 sebesar 32,2%, meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 36,9% dan meningkat pula di tahun 2024 menjadi sebesar 68% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 65% sehingga tingkat capaiannya sebesar 104,62%. Walaupun melebihi target, masih terdapat 32% ASN yang kompetensinya belum sesuai dengan jabatan. Hal ini disebabkan masih kurangnya ASN yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi atau sudah mengikuti namun bukti dukung tidak diupload di Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Sehingga perlu ditingkatkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi dan perlu dilaksanakan sosialisasi upload bukti keikutsertaan kegiatan peningkatan kapasitas di SIMPEG.

c. Persentase kinerja ASN

Dimensi kedua yaitu Kinerja yang diukur dengan indikator persentase kinerja ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2022 sebesar 72,23%, meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 83% dan meningkat pula di tahun 2024 menjadi sebesar 83,36% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 83,10% sehingga tingkat capaiannya sebesar 100,31%. Walaupun melebihi target, masih terdapat 16,64% ASN yang prestasi kerjanya belum sesuai dengan target pada sasaran kinerja pegawai (SKP) nya sehingga perlu dilaksanakan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut.

d. Persentase tingkat pendidikan ASN

Dimensi ketiga yaitu Kualifikasi yang diukur dengan indikator persentase tingkat pendidikan ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2022 sebesar 48,32%, meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 83,48% dan meningkat pula di tahun 2024 menjadi sebesar 84,46% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 83,50% sehingga tingkat capaiannya sebesar 101,15%. Walaupun melebihi target, masih terdapat 15,54% ASN yang mempunyai tingkat pendidikan belum sesuai dengan kualifikasi jabatannya, sehingga perlu ditingkatkan lagi fasilitasi tugas belajar dan ijin belajar bagi ASN.

e. Persentase tingkat kedisiplinan ASN

Dimensi keempat yaitu Kedisiplinan yang diukur dengan indikator persentase tingkat kedisiplinan ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2022 dan 2023 sebesar 100%. Namun, di tahun 2024 turun menjadi sebesar 99,17% tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100% sehingga tingkat capaiannya sebesar 99,17%. Hal ini disebabkan sebanyak 0,83% ASN melakukan pelanggaran disiplin ASN sehingga dijatuhi hukuman disiplin, sehingga perlu ditingkatkan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan disiplin ASN.

f. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

IKM mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kepegawaian yang diberikan BKD Kabupaten Pemalang. IKM ini digunakan untuk menilai kinerja dan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas layanan di masa

depan. Di tahun 2024, realisasi indikator ini sebesar 84,78 (baik) melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 83,95 sehingga Tingkat capaiannya sebesar 100,99%. Walaupun melebihi target, IKM BKD Kabupaten Pemalang masih berada pada kategori Baik sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk peningkatannya.

g. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu mengukur sejauh mana instansi pemerintah telah berhasil dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kinerjanya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta sejauh mana kinerja tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Nilai SAKIP BKD Kabupaten Pemalang di tahun 2022 sebesar 61,55 (baik), meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 63,1 (baik) dan meningkat pula di tahun 2024 menjadi sebesar 65,66 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 65 sehingga tingkat capaiannya sebesar 101,02%. Walaupun melebihi target, SAKIP BKD Kabupaten Pemalang masih berada pada kategori B sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk peningkatannya.

h. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Realisasi indikator ini di tahun 2022 sebesar 54,62 (kurang) sedangkan di tahun 2023 dan 2024 tidak dilaksanakan evaluasi IRB oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang

i. Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya

Untuk meningkatkan kompetensi ASN telah dilaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi dengan capaian sampai dengan tahun 2022 sebanyak 0,45%; sampai dengan tahun 2023 sebanyak 20,57% dan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 84,31% ASN telah meningkat kompetensinya melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 3,7% sehingga tingkat capaiannya sebesar 2218,76%. Walaupun melebihi target, masih terdapat 15,69% ASN yang belum ditingkatkan kompetensinya, sehingga perlu ditingkatkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan BKD Kabupaten Pemalang maupun yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah secara mandiri.

j. Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya

Untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ASN telah dilaksanakan fasilitasi tugas belajar dan ijin belajar dengan capaian di tahun 2022 sebesar 1,44%; di tahun 2023 sebesar 5,49% dan di tahun 2024 sebesar 2,56% ASN telah meningkat kualifikasi pendidikannya melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 1,80% sehingga tingkat capaiannya sebesar 142,50%. Walaupun melebihi target, masih terdapat 15,54% ASN yang mempunyai tingkat pendidikan belum sesuai dengan kualifikasi jabatannya, sehingga perlu ditingkatkan lagi fasilitasi tugas belajar dan ijin belajar bagi ASN.

k. Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi

Untuk meningkatkan kinerja ASN telah dilaksanakan evaluasi kinerja ASN melalui e-kinerja dengan capaian di tahun 2022 dan 2023 sebanyak 100% ASN telah mengisi e-kinerja dan telah dievaluasi kinerjanya. Namun, di tahun 2024 hanya sebanyak 97,50% ASN yang melaporkan kinerjanya. Hal ini disebabkan ASN guru juga diwajibkan melaporkan kinerjanya di aplikasi PMM sehingga tidak melaporkan kinerjanya di aplikasi e-kinerja BKN. Upaya yang akan dilakukan adalah koordinasi dengan Dindikbud Kabupaten Pemalang agar membina ASN guru bahwa kinerja harus dilaporkan juga ke e-kinerja BKN.

1. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya

Evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas dengan capaian di tahun 2023 sebanyak 21,65% pejabat dan di tahun 2024 sebanyak 83,62% pejabat. Evaluasi ini akan terus dilaksanakan secara bertahap.

m. Persentase layanan administrasi kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BKD Kabupaten Pemalang melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian diantaranya pelayanan pengadaan, pemberhentian, kenaikan pangkat, sertifikasi fungsional, diklat, pengembangan karir, pemberian tanda jasa, penghargaan dan ijin cerai. Capaian terhadap pelayanan administrasi kepegawaian di tahun 2022 sebesar 82,29% meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 95%, dan di tahun 2024 sebesar 100%. Layanan administrasi kepegawaian belum optimal pelaksanaannya disebabkan terdapat administrasi kepegawaian yang ditetapkan oleh provinsi atau pusat sehingga BKD Kabupaten Pemalang hanya memfasilitasi pengajuannya.

n. Persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan

Selanjutnya, dalam administrasi dan pengelolaan data kepegawaian telah digunakan sistem kepegawaian yang harus dimutakhirkan dan dikembangkan setiap saat. Di tahun 2022 capaian persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan sebesar 67% meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 80% dan sebesar 100% di tahun 2024. Sistem kepegawaian yang digunakan oleh BKD Kabupaten Pemalang adalah SIMPEG yang sudah terintegrasi dengan SI ASN BKN sehingga harus dimutakhirkan setiap ada penambahan menu atau fitur pada SI ASN.

o. Persentase tingkat kedisiplinan ASN

Indikator ini diukur dari tingkat kehadiran berdasarkan absensi dan jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin sehingga mendapatkan hukuman disiplin. Tingkat kedisiplinan ASN di tahun 2022 sebesar 97,48% meningkat di tahun 2023 sebesar 98,65% dan meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar 99,89%. Sampai dengan tahun 2024 masih terdapat pelanggaran disiplin ASN yang terjadi, sehingga diperlukan pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif.

Di tahun 2025 terdapat perubahan indikator kinerja BKD Kabupaten Pemalang, yaitu IRB sudah tidak dijadikan indikator kinerja dan penambahan indikator kinerja baru, meliputi :

- a. Persentase capaian perencanaan dan keuangan; dan
- b. Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian.

BKD Kabupaten Pemalang harus berupaya meningkatkan kapabilitas birokrasi agar mencapai nilai optimal dengan meningkatkan profesionalitas ASN melalui peningkatan dimensi-dimensinya berupa kompetensi, kinerja, kualifikasi dan kedisiplinan. Upaya yang dilakukan berupa fasilitasi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; pelaksanaan mutasi dan promosi ASN; penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN; serta pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.

Hasil evaluasi kinerja BKD Kabupaten Pemalang tahun 2025 sampai dengan triwulan satu dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Status Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Status Pencapaian Indikator Kinerja	2025	
		Jumlah Indikator	%
1	Telah tercapai (hijau)	1	6,25
2	Akan tercapai (biru)	4	25,00
3	Perlu upaya keras (kuning)	11	68,75
Total Indikator		16	100,00

Data realisasi indikator kinerja yang belum dapat tersedia/dihitung pada triwulan I karena indikator tersebut baru dapat dihitung di triwulan II dan IV antara lain : Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN), persentase kompetensi ASN, persentase kinerja ASN, persentase tingkat pendidikan ASN, persentase tingkat kedisiplinan ASN, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan nilai SAKIP. Capaian kinerja BKD Kabupaten Pemalang tahun 2025 sampai dengan triwulan I ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja BKD Kabupaten Pemalang Hingga Triwulan I Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Tahun 2025		% Realisasi TW I Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025	Status Capaian
			Target	Realisasi TW I		
Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78,30	0	0	↔
Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase kompetensi ASN	%	68,10	0	0	↔
Meningkatnya kinerja ASN	Persentase kinerja ASN	%	83,40	0	0	↔
Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN	Persentase tingkat pendidikan ASN	%	84,50	0	0	↔
Meningkatnya disiplin ASN	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	%	100	0	0	↔
Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,80	0	0	↔
	Nilai SAKIP	Nilai	65,70	0	0	↔
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian perencanaan dan keuangan	%	100	66,67	66,67	➡
	Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian	%	100	26,19	26,19	➡
Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	%	2,99	0,03	0,93	↔
	Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya	%	3,48	2,81	80,78	➡
	Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi	%	100	98,93	98,93	➡
	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%	1,9	0	0	↔
	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100	23,71	23,71	↔
	Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan	%	100	0	0	↔
	Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	%	85	99,98	117,63	★

Keterangan : ★ : telah tercapai, ➡ : akan tercapai, ↔ : perlu upaya keras

2.2. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan dengan menghitung realisasi kinerja dan anggaran dibandingkan dengan targetnya. Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017, status capaian kinerja dan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Status Capaian Kinerja dan Anggaran

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Status
1	22,50% ≤	Sangat tinggi (ST)
2	18,76% ≤ 22,50%	Tinggi (T)
3	16,26 ≤ 18,75%	Sedang (S)
4	12,51% ≤ 16,25%	Rendah (R)
5	≤ 12,50%	Sangat Rendah (SR)

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di BKD Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 sampai dengan triwulan I dapat disampaikan sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2025 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan BKD Kabupaten Pemalang sebesar Rp13.458.659.450,- yang terbagi dalam 2 program, 11 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan I, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp1.980.313.879,- atau sebesar 14,47% yang masuk dalam status **rendah**.

Berikut adalah hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKD Kabupaten Pemalang sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja untuk program ini adalah :

- Persentase capaian perencanaan dan keuangan dengan target sebesar 100%. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah tercapai sebesar 66,67% sehingga capaian kinerja program menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 66,67% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 25,40%.
- Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian dengan target sebesar 100%. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah tercapai sebesar 26,19% sehingga capaian kinerja program menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 26,19% namun realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 9,16%.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 9 dokumen (Renstra 2025-2029, Renja 2026, Perubahan Renja 2025, RKA 2026, RKA Perubahan 2025, DPA 2026, DPA Perubahan 2025, LKjIP, MR Renstra). Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah tersusun sebanyak 3 dokumen sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 33,33% namun realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 0%.

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2025 Triwulan I
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 TW I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 TW I	
		K	Rp	K	Rp
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	SR	SR
b	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	0	0	SR	SR
c	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	100	0	ST	SR
d	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	0	0	SR	SR
e	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	0	0	SR	SR
f	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	0	ST	SR
g	Evaluasi kinerja perangkat daerah	100	0	ST	SR
Kegiatan		33,33	0	ST	ST

Keterangan : SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi), dan ST (sangat tinggi)

Faktor penyebab capaian rendah dan sangat rendah :

- a. Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan Renstra 2025-2029, Renja 2026, Perubahan Renja 2025 disusun di triwulan III.
- b. Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan RKA 2026 disusun di triwulan IV.
- c. Capaian keuangan pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan LPJ masih dalam proses.
- d. Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan DPA 2026 disusun di triwulan IV.
- e. Capaian keuangan pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan DPA pergeseran belum ditetapkan.
- f. Capaian keuangan pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan LPJ masih dalam proses.
- g. Capaian keuangan pada sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan LPJ masih dalam proses.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sebanyak 1 dokumen (laporan keuangan akhir tahun 2024). Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah tersusun sebanyak 1 dokumen sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 100% dan realisasi anggaran juga menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 25,46%.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2025 Triwulan I
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 TW I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 TW I	
		K	Rp	K	Rp
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25	25,46	ST	ST
b	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100	0	ST	SR
Kegiatan		100	25,46	ST	ST

Keterangan : SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi), dan ST (sangat tinggi)

Faktor penyebab capaian rendah dan sangat rendah :

- a. Capaian keuangan pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan LPJ masih dalam proses

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah sebanyak 1 dokumen (laporan pelaksanaan sosialisasi). Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 kegiatan sosialisasi belum dilaksanakan sehingga capaian kinerja dan keuangan kegiatan menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 0%.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2025 Triwulan I
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 TW I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 TW I	
		K	Rp	K	Rp
a	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	SR	SR
Kegiatan		0	0	SR	SR

Keterangan : SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi), dan ST (sangat tinggi)

Faktor penyebab capaian rendah dan sangat rendah :

- a. Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan kegiatan sosialisasi belum dilaksanakan.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah jumlah paket administrasi umum perangkat daerah yang disediakan sebanyak 26 paket. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah tersedia sebanyak 6 paket sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 23,08% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 9,32%.

Tabel 2.8
 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2025 Triwulan I
 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 TW I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 TW I	
		K	Rp	K	Rp
a	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25	1,92	ST	SR
b	Penyediaan bahan logistik kantor	25	3,86	ST	SR
c	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	14,63	SR	R
d	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25	23,24	ST	ST
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25	0	ST	SR
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	13,53	ST	R
Kegiatan		23,08	9,32	ST	SR

Keterangan : SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi), dan ST (sangat tinggi)

Faktor penyebab capaian rendah dan sangat rendah :

- a. Capaian keuangan pada sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan pembelian komponen listrik tergantung pada kebutuhan.
- b. Capaian keuangan pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan pembelian bahan logistik kantor tergantung pada kebutuhan.
- c. Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan cetak dan ganda dilaksanakan di triwulan II dan IV
- d. Capaian keuangan pada sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan belum ada kunjungan tamu yang difasilitasi.
- e. Capaian keuangan pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD menunjukkan hasil rendah. Hal ini disebabkan perjalanan dinas tergantung pada undangan.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan sebanyak 14 unit (5 laptop, 3 dispenser, 4 printer, 2 filling cabinet). Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi 9 unit barang sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 64,29% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 0%. Hal ini disebabkan LPJ masih dalam proses.

Tabel 2.9
 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2025 Triwulan I
 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Sub Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 TW I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 TW I	
		K	Rp	K	Rp
a	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	64,29	0	ST	SR
Kegiatan		64,29	0	ST	SR

Faktor penyebab capaian rendah dan sangat rendah :

- a. Capaian keuangan pada sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan LPJ masih dalam proses.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sebanyak 36 laporan. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah tersusun sebanyak 9 laporan sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 25% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sedang** yaitu sebesar 17,17%.

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2025 Triwulan I
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 TW I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 TW I	
		K	Rp	K	Rp
a	Penyediaan jasa surat menyurat	25	0	ST	SR
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	25	13,03	ST	R
c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	25	24,74	ST	ST
Kegiatan		25	17,17	ST	S

Keterangan : SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi), dan ST (sangat tinggi)

Faktor penyebab capaian rendah dan sangat rendah :

- a. Capaian keuangan pada sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan belum ada pengiriman surat yang membutuhkan biaya.
- b. Capaian keuangan pada sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik menunjukkan hasil rendah. Hal ini disebabkan LPJ masih dalam proses.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara sebanyak 86 unit. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah terpelihara barang milik daerah sebanyak 16 unit sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sedang** yaitu sebesar 18,60% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 6,65%.

Tabel 2.11
 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2025 Triwulan I
 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
 Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 TW I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 TW I	
		K	Rp	K	Rp
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	11,11	4,69	SR	SR
b	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	11,11	0,16	SR	SR
c	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	0	0	SR	SR
d	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	23,40	0,62	ST	SR
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	50	25,63	ST	ST
Kegiatan		18,60	6,65	S	SR

Keterangan : SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi), dan ST (sangat tinggi)

Faktor penyebab capaian rendah dan sangat rendah :

- a. Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan pembayaran pajak kendaraan jabatan tergantung pada jatuh tempo pajak.
- b. Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan pembayaran pajak kendaraan jabatan tergantung pada jatuh tempo pajak.
- c. Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan pemeliharaan akan dilaksanakan pada triwulan 4.
- d. Capaian keuangan pada sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan pemeliharaan dilaksanakan juga di triwulan II, III dan IV.

B. Program Kepegawaian Daerah

Indikator kinerja untuk program ini adalah :

- Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya dengan target sebesar 2,99%. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah tercapai sebesar 0,03% sehingga capaian kinerja program menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 0,93% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 0,29%.

- Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya dengan target sebesar 3,48%. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah tercapai sebesar 2,81% sehingga capaian kinerja program menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 80,78% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 7,74%.
- Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi dengan target sebesar 100%. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah tercapai sebesar 98,93% sehingga capaian kinerja program menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 98,93% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 3,71%.
- Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya dengan target sebesar 100%. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 kegiatan pelantikan administrasi belum dilaksanakan sehingga capaian kinerja program menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 0% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 1,21%.
- Persentase layanan administrasi kepegawaian dengan target sebesar 100%. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah tercapai sebesar 23,71% sehingga capaian kinerja program menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 23,71% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 5,69%.
- Persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan dengan target sebesar 100%. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 kegiatan pemutakhiran SIMPEG belum dilaksanakan sehingga capaian kinerja program menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 0% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 7,73%.
- Persentase tingkat kedisiplinan ASN dengan target sebesar 85%. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah tercapai sebesar 99,98% sehingga capaian kinerja program menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 117,63% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 2,52%.

1. Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN

Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah :

- Jumlah laporan hasil fasilitasi pengadaan CASN dengan target sebanyak 2 dokumen. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dokumen belum tersusun sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 0% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 12,83%.
- Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pemberhentian ASN) yang terlayani tepat waktu dengan target sebanyak 500 dokumen. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah tersusun sebanyak 112 dokumen sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **tinggi** yaitu sebesar 22,40% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **rendah** yaitu sebesar 14,17%.
- Jumlah dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian dengan target sebanyak 5 dokumen. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah tersusun sebanyak 1 dokumen sehingga capaian kinerja kegiatan

menunjukkan hasil **tinggi** yaitu sebesar 20% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 7,73%.

Adapun untuk rata-rata capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **tinggi** yaitu sebesar 22,29% dan rata-rata realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 10,52%.

Tabel 2.12

Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2025 Triwulan I
Kegiatan Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN

No	Sub Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 TW I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 TW I	
		K	Rp	K	Rp
a	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	0	9,64	SR	SR
b	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	0	13,66	SR	R
c	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	22,40	14,17	T	R
d	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	25	7,87	ST	SR
e	Pengelolaan data kepegawaian	0	9,51	SR	SR
f	Evaluasi data, informasi dan sistem kepegawaian	0	5,41	SR	SR
Kegiatan		22,29	10,52	T	SR

Keterangan : SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi), dan ST (sangat tinggi)

Faktor penyebab capaian rendah dan sangat rendah :

- a. Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan dokumen belum ditetapkan karena masih diajukan ke Kemen PAN-RB untuk divalidasi.
- b. Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK menunjukkan hasil sangat rendah dan rendah. Hal ini disebabkan fasilitasi CASN menunggu jadwal dari KemenPAN RB dan BKN.
- c. Capaian keuangan pada sub kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian menunjukkan hasil rendah. Hal ini disebabkan fasilitasi pensiun juga dilaksanakan di triwulan II, III, dan IV.
- d. Capaian keuangan pada sub kegiatan pengelolaan sistem informasi kepegawaian menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan kegiatan pengembangan SIMPEG dilaksanakan di triwulan IV.
- e. Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan pengelolaan data kepegawaian menunjukkan sangat rendah. Hal ini disebabkan ASN dalam angka sedang dalam proses penyusunan.
- f. Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan evaluasi data, informasi dan sistem kepegawaian menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan kegiatan dilaksanakan di triwulan II dan IV.

2. Mutasi dan Promosi ASN

Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah :

- Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN dengan target sebanyak 6 dokumen. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah tersusun sebanyak 1 dokumen sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sedang** yaitu sebesar 16,67% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 1,21%.

- Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat) yang terlayani tepat waktu dengan target sebanyak 6 dokumen. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah tersusun sebanyak 1 dokumen sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sedang** yaitu sebesar 16,67% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 5,88%.

Adapun untuk rata-rata capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sedang** yaitu sebesar 16,67% dan rata-rata realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 1,77%.

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2025 Triwulan I
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

No	Sub Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 TW I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 TW I	
		K	Rp	K	Rp
a	Pengelolaan Mutasi ASN	25	1,70	ST	SR
b	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	16,67	5,88	S	SR
c	Pengelolaan promosi ASN	0	1,16	SR	SR
Kegiatan		16,67	1,77	S	SR

Keterangan : SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi), dan ST (sangat tinggi)

Faktor penyebab capaian rendah dan sangat rendah :

- Capaian keuangan pada sub kegiatan pengelolaan mutasi ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan LPJ masih dalam proses.
- Capaian keuangan pada sub kegiatan pengelolaan kenaikan pangkat ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan LPJ masih dalam proses.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan pengelolaan promosi ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan belum ada kegiatan pelantikan.

3. Pengembangan kompetensi ASN

Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah :

- Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya dengan target sebanyak 325 orang. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebanyak 3 orang sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 0,92% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 0,31%.
- Jumlah ASN yang telah mengikuti uji kompetensi dan potensi dengan target sebanyak 120 orang. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebanyak 16 orang sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **rendah** yaitu sebesar 13,33% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 0%.
- Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya dengan target sebanyak 100 orang. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebanyak 27 orang sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 27% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 3,38%.
- Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, pengembangan karir jabatan fungsional) yang terlayani tepat waktu dengan target sebanyak 19 orang. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebanyak

3 orang sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **rendah** yaitu sebesar 15,79% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 0%.

Adapun untuk rata-rata capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 8,69% dan rata-rata realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 0,49%.

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2025 Triwulan I
Kegiatan Pengembangan kompetensi ASN

No	Sub Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 TW I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 TW I	
		K	Rp	K	Rp
a	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	0,92	0	SR	SR
b	Pengelolaan assesment center	0	0	SR	SR
c	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	27	3,38	ST	SR
d	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	33,33	9,86	ST	SR
e	Pembinaan jabatan fungsional ASN	11,25	0	SR	SR
Kegiatan		8,69	0,49	SR	SR

Keterangan : SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi), dan ST (sangat tinggi)

Faktor penyebab capaian rendah dan sangat rendah :

- a. Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan peningkatan kapasitas kinerja ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan pengiriman peserta latsar dilaksanakan di triwulan III dan IV.
- b. Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan pengelolaan assesment center menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan uji kompetensi akan diadakan di triwulan III dan IV.
- c. Capaian keuangan pada sub kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan LPJ masih dalam proses.
- d. Capaian keuangan pada sub kegiatan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan LPJ masih dalam proses.
- e. Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan pembinaan jabatan fungsional ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan pengembangan karir fungsional tergantung formasi yang ditetapkan Kemenpan dan atas persetujuan BKN.

4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah :

- Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja ASN dengan target sebanyak 4 dokumen. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah tersusun sebanyak 1 dokumen sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 25% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 1,03%.
- Jumlah pegawai yang mendapat penghargaan dan tanda jasa dengan target sebanyak 2487 orang. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebanyak 2477 orang sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 99,60% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 5,61%.

- Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (ijin perceraian) yang terlayani tepat waktu dengan target sebanyak 10 dokumen. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebanyak 4 dokumen sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 40% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 1,28%.
- Jumlah dokumen pengelolaan disiplin ASN dengan target sebanyak 4 dokumen. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebanyak 1 dokumen sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 25% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 2,52%.

Adapun untuk rata-rata capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 99,12% dan rata-rata realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 3,24%.

Tabel 2.15
 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2025 Triwulan I
 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

No	Sub Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 TW I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 TW I	
		K	Rp	K	Rp
a	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	25	1,03	ST	SR
b	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	100	6,49	ST	SR
c	Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai	0	0	SR	SR
d	Pembinaan disiplin ASN	2,75	0	SR	SR
e	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	25	8,76	ST	SR
f	Pelayanan proses izin perceraian pegawai	40	1,28	ST	SR
Kegiatan		99,12	3,24	ST	SR

Keterangan : SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi), dan ST (sangat tinggi)

Faktor penyebab capaian rendah dan sangat rendah :

- Capaian keuangan pada sub kegiatan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan LPJ masih dalam proses.
- Capaian keuangan pada sub kegiatan pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan LPJ masih dalam proses.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan pengelolaan tanda jasa bagi pegawai menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan pengusulan ke Provinsi Jateng sudah diajukan sebanyak 199 orang, namun penetapan merupakan kewenangan Provinsi Jawa Tengah.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan pembinaan disiplin ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan pembinaan juga akan dilaksanakan di triwulan III dan IV.
- Capaian keuangan pada sub kegiatan pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan LPJ masih dalam proses.
- Capaian keuangan pada sub kegiatan pelayanan proses izin perceraian pegawai menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan LPJ masih dalam proses.

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Penetapan		Pergeseran		Triwulan I			
				Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Keuangan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				13,458,659,450		13,683,135,450			1,980,313,879	14.47
5.03	KEPEGAWAIAN										
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8,441,484,700		8,207,037,740			1,880,756,679	22.92
		Persentase capaian perencanaan dan keuangan	Persen	100.00	6,959,565,000	100.00	6,953,712,300	66.67	66.67	1,765,917,955	25.40
		Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian	Persen	100.00	1,481,919,700	100.00	1,253,325,440	26.19	26.19	114,838,724	9.16
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	9	22,577,000	9	17,317,400	3	33.33	-	-
5.03.01.2..01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	4,705,000	3	3,710,500	0	0.00	-	-
5.03.01.2..01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	2,635,000	1	1,961,500	0	0.00	-	-
5.03.01.2..01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	2,465,000	1	1,973,000	1	100.00	-	-
5.03.01.2..01.0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	2,525,000	1	1,865,000	0	0.00	-	-
5.03.01.2..01.0005	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	2,825,000	1	2,094,500	0	0.00	-	-
5.03.01.2..01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	laporan	1	4,267,000	1	3,504,400	1	100.00	-	-
5.03.01.2..01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	1	3,155,000	1	2,208,500	1	100.00	-	-
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen	1	6,936,988,000	1	6,936,394,900	1	100.00	1,765,917,955	25.46
5.03.01.2..02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	6,935,011,000	12	6,935,011,000	3	25.00	1,765,917,955	25.46
5.03.01.2..02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	1	1,977,000	1	1,383,900	1	100.00	-	-
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	dokumen	3	188,660,000	3	85,220,000	0	0.00	-	-
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	545	188,660,000	425	85,220,000	0	0.00	-	-

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Penetapan		Pergeseran		Triwulan I			
				Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Keuangan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	paket	26	503,950,150	26	384,710,270	6	23.08	35,847,435	9.32
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	12	14,992,500	12	14,992,500	3	25.00	288,000	1.92
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12	168,030,050	12	164,598,050	3	25.00	6,349,435	3.86
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	2	25,887,600	2	12,306,370	0	0.00	1,800,000	14.63
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	4	20,010,000	4	20,010,000	1	25.00	4,650,000	23.24
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	4	6,095,000	4	4,632,500	1	25.00	-	-
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	12	268,935,000	12	168,170,850	3	25.00	22,760,000	13.53
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	unit	14	144,607,550	14	144,577,670	9	64.29	-	-
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	14	144,607,550	14	144,577,670	9	64.29	-	-
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan	36	348,071,000	36	346,871,000	9	25.00	59,562,789	17.17
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	4,375,000	12	3,175,000	3	25.00	-	-
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	217,600,000	12	217,600,000	3	25.00	28,362,789	13.03
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	126,096,000	12	126,096,000	3	25.00	31,200,000	24.74
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	unit	86	296,631,000	86	291,946,500	16	18.60	19,428,500	6.65
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	9	114,860,000	9	111,485,000	1	11.11	5,226,000	4.69
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	27	51,220,000	27	51,220,000	3	11.11	80,500	0.16
5.03.01.2.09.0003	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	unit	1	29,985,000	1	28,675,500	0	0.00	-	-
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	47	46,590,000	47	46,590,000	11	23.40	289,000	0.62
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	53,976,000	2	53,976,000	1	50.00	13,833,000	25.63

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Penetapan		Pergeseran		Triwulan I			
				Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Keuangan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				5,017,174,750		5,476,097,710			99,557,200	1.82
		Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	Persen	3.20	2,933,142,490	2.99	3,361,287,180	0.03	0.93	9,691,000	0.29
		Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya	Persen	3.48	615,246,860	3.48	453,280,040	2.81	80.78	35,062,000	7.74
		Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi	Persen	100	334,841,220	100	234,728,870	98.93	98.93	8,710,500	3.71
		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	Persen	8.08	263,528,800	100.00	821,583,980	0	0.00	9,901,500	1.21
		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	Persen	100	390,736,060	100	258,951,470	23.71	23.71	14,730,200	5.69
		Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan	Persen	100	314,682,900	100	244,515,150	0	0.00	18,897,000	7.73
		Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	Persen	85	164,996,420	85	101,751,020	99.98	117.63	2,565,000	2.52
5.03.02.2.01	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN				746,290,000	507	508,610,580	113	22.29	53,513,000	10.52
		Jumlah laporan hasil fasilitasi pengadaan CASN	Dokumen	2	342,384,100	2	208,958,530	0	0.00	26,805,000	12.83
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pemberhentian ASN) yang terlayani tepat waktu	Dokumen	550	89,223,000	500	55,136,900	112	22.40	7,811,000	14.17
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian	Dokumen	5	314,682,900	5	244,515,150	1	20.00	18,897,000	7.73
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Dokumen	2	69,966,400	2	43,374,400	0	0.00	4,183,000	9.64
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan ASN	Dokumen	2	272,417,700	2	165,584,130	0	0.00	22,622,000	13.66
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Dokumen	550	89,223,000	500	55,136,900	112	22.40	7,811,000	14.17
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Dokumen	4	135,397,500	4	126,957,250	1	25.00	9,990,000	7.87
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	Dokumen	1	96,133,000	1	62,101,500	0	0.00	5,907,000	9.51
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi data, informasi, dan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	Dokumen	2	83,152,400	2	55,456,400	0	0.00	3,000,000	5.41
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN				423,096,000	12	934,956,620	2	16.67	16,565,700	1.77
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN	Dokumen	7	263,528,800	6	821,583,980	1	16.67	9,901,500	1.21
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat) yang terlayani tepat waktu	Dokumen	6	159,567,200	6	113,372,640	1	16.67	6,664,200	5.88
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	4	101,088,400	4	68,238,080	1	25.00	1,157,000	1.70
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Dokumen	6	159,567,200	6	113,372,640	1	16.67	6,664,200	5.88

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Penetapan		Pergeseran		Triwulan I			
				Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Keuangan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Dokumen	3	162,440,400	2	753,345,900	0	0.00	8,744,500	1.16
5.03.02.2.03	Pengembangan kompetensi ASN				3,318,005,350	564	3,676,150,510	49	8.69	17,948,000	0.49
		Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya	orang	348	2,820,680,040	325	3,132,646,220	3	0.92	9,691,000	0.31
		Jumlah ASN yang telah mengikuti uji kompetensi dan potensi	orang	120	112,462,450	120	228,640,960	16	13.33	-	-
		Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya	orang	100	272,862,760	100	244,321,510	27	27.00	8,257,000	3.38
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, pengembangan karir jabatan fungsional) yang terlayani tepat waktu	orang	19	112,000,100	19	70,541,820	3	15.79	-	-
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	orang	348	2,695,827,700	325	3,034,318,950	3	0.92	-	-
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan assesment center	Jumlah dokumen pengelolaan assesment center	Dokumen	1	112,462,450	1	228,640,960	0	0.00	-	-
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapat pendidikan lanjutan	orang	100	272,862,760	100	244,321,510	27	27.00	8,257,000	3.38
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Dokumen	3	124,852,340	3	98,327,270	1	33.33	9,691,000	9.86
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan jabatan fungsional ASN	Jumlah ASN fungsional yang dibina	orang	280	112,000,100	80	70,541,820	9	11.25	-	-
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				529,783,400	2505	356,380,000	2483	99.12	11,530,500	3.24
		Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja ASN	Dokumen	4	153,713,300	4	97,388,700	1	25.00	1,000,000	1.03
		Jumlah pegawai yang mendapat penghargaan dan tanda jasa	Orang	2316	181,127,920	2487	137,340,170	2477	99.60	7,710,500	5.61
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (ijin perceraian) yang terlayani tepat waktu	Dokumen	10	29,945,760	10	19,900,110	4	40.00	255,000	1.28
		Jumlah dokumen pengelolaan disiplin ASN	Dokumen	4	164,996,420	4	101,751,020	1	25.00	2,565,000	2.52
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	4	153,713,300	4	97,388,700	1	25.00	1,000,000	1.03
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	orang	2306	151,482,920	2477	118,858,670	2477	100.00	7,710,500	6.49
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	orang	10	29,645,000	10	18,481,500	0	0.00	-	-
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	orang	400	114,996,420	400	72,485,820	11	2.75	-	-
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Laporan	4	50,000,000	4	29,265,200	1	25.00	2,565,000	8.76
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan proses izin perceraian pegawai	Jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani	Dokumen	10	29,945,760	10	19,900,110	4	40.00	255,000	1.28

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis BKD Kabupaten Pemalang

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. BKD Kabupaten Pemalang sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

Adapun permasalahan yang dihadapi BKD Kabupaten Pemalang, meliputi:

- 1) Perlu ditingkatkannya fasilitasi perencanaan dan administrasi keuangan.
- 2) Perlu ditingkatkannya fasilitasi layanan umum dan kepegawaian.
- 3) Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN sehingga sampai dengan tahun 2024 masih terdapat 15,69% ASN yang belum mengembangkan kompetensinya.
- 4) Belum optimalnya peningkatan kualifikasi pendidikan ASN sehingga sampai dengan tahun 2024 baru sebanyak 2,56% ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya.
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kinerja ASN di tahun 2024 sehingga sebanyak 2,50% ASN tidak melaporkan kinerjanya melalui e-kinerja BKN.
- 6) Belum optimalnya evaluasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas sehingga di tahun 2024 sebanyak 16,38% pejabat belum dievaluasi.
- 7) Perlu ditingkatkannya kualitas layanan administrasi kepegawaian.
- 8) Perlu dikembangkannya sistem kepegawaian.
- 9) Belum optimalnya tingkat kedisiplinan ASN di tahun 2024 sehingga terdapat 0,11% ASN yang mendapat hukuman disiplin.

Secara rinci permasalahan pelayanan BKD Kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.17
Pemetaan Permasalahan Pelayanan BKD Kabupaten Pemalang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Perlu ditingkatkannya fasilitasi perencanaan dan administrasi keuangan	Belum tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan PD
			Belum optimalnya penyusunan dokumen penganggaran PD
			Belum optimalnya penyusunan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Belum optimalnya penyusunan laporan evaluasi kinerja PD
		Belum optimalnya pengadministrasian keuangan	Perlunya penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulan
			Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan PD
2	Perlu ditingkatkannya fasilitasi layanan umum dan kepegawaian	Belum optimalnya pengadministrasian kepegawaian	Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan
		Belum optimalnya penyediaan layanan administrasi umum	Terdapat komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang perlu diganti
			Belum tercukupinya bahan logistik kantor
			Terdapat barang yang harus dicetak dan digandakan
			Minimnya bahan bacaan yang tersedia

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Terdapat kunjungan tamu yang harus difasilitasi
			Terdapat materi yang harus dikoordinasi dan konsultasikan
		Belum tercukupinya BMD sesuai kebutuhan	Belum tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas jabatan
			Belum tercukupinya kebutuhan peralatan dan mesin lainnya
		Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas	Terdapat surat-surat yang harus diadministrasi
			Terdapat kebutuhan listrik, PDAM yang harus dibayar
			Jumlah ASN belum mencukupi kebutuhan
		Belum optimalnya pemeliharaan BMD	Terdapat kendaraan dinas jabatan yang harus dipelihara
			Terdapat kendaraan dinas operasional yang harus dipelihara
			Terdapat alat besar yang harus dipelihara
			Terdapat peralatan dan mesin yang harus dipelihara
			Terdapat gedung kantor yang harus dipelihara
3	Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN	Masih terdapat ASN yang tidak mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi	Belum optimalnya peningkatan kapasitas kinerja ASN
			Belum optimalnya pengelolaan assesment center
4	Belum optimalnya peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	Masih terdapat ASN yang kualifikasi pendidikannya belum sesuai dengan jabatannya	Belum optimalnya pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
5	Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kinerja ASN	Perlu dilaksanakan evaluasi kinerja ASN	Belum optimalnya pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
6	Belum optimalnya evaluasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	Perlu dilaksanakan pengelolaan mutasi dan promosi ASN	Belum optimalnya pengelolaan Mutasi ASN
			Belum optimalnya pengelolaan promosi ASN
7	Perlu ditingkatkannya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Perlu dilaksanakan layanan pengadaan dan pemberhentian ASN	Belum optimalnya layanan pengadaan ASN
			Belum optimalnya layanan pemberhentian ASN
			Belum optimalnya fasilitasi Lembaga Profesi ASN
		Perlu dilaksanakan layanan kenaikan pangkat ASN	Belum optimalnya pengelolaan kenaikan pangkat ASN
		Perlu dilaksanakan layanan sertifikasi, diklat, pengembagangan karir jabatan fungsional	Belum optimalnya fasilitasi sertifikasi jabatan ASN
			Belum optimalnya fasilitasi diklat dan sertifikasi jabatan fungsional
			Belum optimalnya fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional
		Perlu dilaksanakan layanan tanda jasa, penghargaan, ijin cerai	Belum optimalnya pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
			Belum optimalnya pengelolaan tanda jasa bagi pegawai
			Belum optimalnya pelayanan proses izin perceraian pegawai

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
8	Perlu dikembangkan sistem kepegawaian	Belum optimalnya pengelolaan system dan data kepegawaian	Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi kepegawaian
			Belum optimalnya pengelolaan data kepegawaian
9	Belum optimalnya tingkat kedisiplinan ASN	Belum optimalnya pengelolaan disiplin ASN	Belum optimalnya pembinaan disiplin ASN
			Belum optimalnya pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN

- Adapun isu strategis BKD Kabupaten Pemalang, yaitu :
1. Perlu ditingkatkannya profesionalitas ASN;
 2. Perlu ditingkatkannya kompetensi ASN;
 3. Perlu ditingkatkannya kinerja ASN;
 4. Perlu ditingkatkannya kualifikasi pendidikan ASN;
 5. Perlu ditingkatkannya kedisiplinan ASN;
 6. Perlu ditingkatkannya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKD KABUPATEN PEMALANG

3.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Program yang direncanakan adalah :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Adanya penambahan anggaran sebesar Rp832.811.630,- yaitu dari anggaran sebesar Rp8.441.484.700,- menjadi sebesar Rp9.274.296.330,- menyebabkan perubahan target kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan layanan administrasi kesekretariatan di BKD Kabupaten Pemalang, meliputi administrasi perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian yang diukur dengan indikator kinerja berupa persentase capaian perencanaan dan keuangan dengan target sebesar 100% serta persentase capaian layanan umum dan kepegawaian dengan target sebesar 100%.

Layanan administrasi perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas, laporan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan, penyediaan gaji dan tunjangan, serta penyusunan laporan keuangan yang akuntabel. Pada penetapan tahun 2025 telah dialokasikan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 9 dokumen berupa : Renstra, Renja, Perubahan Renja, RKA, Perubahan RKA, DPA, Perubahan DPA, LKjIP, MR, namun di perubahan akan disusun sebanyak 16 dokumen berupa : Renstra, Renja, Perubahan Renja, RKA, RKA Pergeseran 1, RKA Pergeseran 2, Perubahan RKA, DPA, DPA Pergeseran 1, DPA Pergeseran 2, Perubahan DPA, LKjIP, Laporan Pelaksanaan Perjanjian Kinerja, MR Renstra, MR Renja, Laporan Realisasi MR. Sedangkan untuk penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah di perubahan masih sama dengan penetapan tahun 2025 yaitu dialokasikan gaji dan tunjangan selama 12 bulan dan penyusunan 2 laporan keuangan.

Layanan umum dan kepegawaian meliputi administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang dan pemeliharaan barang milik daerah. Pada penetapan tahun 2025 telah dialokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM sebanyak 545 orang, namun karena adanya efisiensi di perubahan target dirubah menjadi 385 orang. Kebutuhan administrasi umum yang harus tercukupi meliputi komponen instalasi listrik, bahan logistik kantor, cetak dan penggandaan, bahan bacaan, fasilitasi kunjungan tamu serta koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan. Di perubahan ini, terdapat 1 sub kegiatan baru, yaitu dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan target 1 dokumen. Selanjutnya, sarana dan prasarana kantor yang dialokasikan pada penetapan tahun 2025 berupa peralatan dan mesin lainnya sebanyak 14 unit, di perubahan disesuaikan pembelian peralatan dan mesin lainnya menjadi sebanyak 113 unit. Jasa penunjang yang harus tersedia adalah surat menyurat, internet, PDAM, listrik dan tenaga non ASN selama 12 bulan. Agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar harus didukung oleh sarana dan prasarana dalam kondisi baik. Adapun barang milik daerah yang perlu dipelihara kendaraan dinas sebanyak 36 unit, alat besar sebanyak 1 unit, peralatan dan mesin lainnya sebanyak 47 unit serta gedung kantor sebanyak 2 unit.

B. Program Kepegawaian

Adanya penambahan anggaran sebesar Rp1.020.439.370,- yaitu dari anggaran sebesar Rp5.017.174.750,- menjadi sebesar Rp6.037.614.120,- menyebabkan perubahan target pada tahun 2025. Program ini bertujuan untuk : (1) mengembangkan kompetensi ASN yang diukur dengan indikator persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya dengan target di penetapan sebesar 2,84% dan di perubahan menjadi sebesar 3,62%; (2) meningkatkan kualitas pendidikan ASN sesuai jabatannya yang diukur dengan indikator persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya dengan target di penetapan sebesar 3,38% dan di perubahan menjadi sebesar 3,48%; (3) melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja ASN yang diukur dengan indikator persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi dengan target di penetapan dan perubahan sebesar 100%; (4) melaksanakan mutasi dan promosi ASN sesuai kinerjanya yang diukur dengan indikator persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya dengan target di penetapan dan perubahan sebesar 8,08%; (5) melaksanakan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu yang diukur dengan indikator persentase layanan administrasi kepegawaian dengan target di penetapan dan perubahan sebesar 100%; (6) meningkatkan kualitas sistem informasi layanan kepegawaian yang terintegrasi yang diukur dengan indikator persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan dengan target di penetapan dan perubahan sebesar 100%; dan (7) meningkatkan kedisiplinan ASN yang diukur dengan indikator persentase tingkat kedisiplinan ASN dengan target di penetapan dan perubahan sebesar 85%.

Peningkatan kompetensi ASN diupayakan melalui peningkatan kapasitas ASN yang semula ditargetkan sebanyak 348 orang di perubahan menjadi 394 orang dan pengelolaan *assessment center* selama 1 tahun. Peningkatan kualifikasi pendidikan ASN diupayakan melalui fasilitasi tugas belajar dan ijin belajar sebanyak 100 orang. Peningkatan evaluasi nilai kinerja aparatur diupayakan melalui pembinaan, pendampingan dan evaluasi kinerja aparatur melalui e-kinerja BKD yang dilakukan setiap triwulan sehingga diharapkan aparatur yang masih memiliki nilai kinerja dibawah ekspektasi akan memperbaiki dan terjadi peningkatan kinerja di triwulan berikutnya. Sedangkan untuk evaluasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas dilaksanakan ketika akan ada promosi atau mutasi ASN. Sampai dengan triwulan I belum ada pelaksanaan evaluasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas.

Peningkatan layanan administrasi kepegawaian diupayakan melalui peningkatan layanan pengadaan dan pemberhentian ASN; kenaikan pangkat ASN; sertifikasi, diklat dan pengembangan karir jabatan fungsional; serta tanda jasa, penghargaan dan ijin cerai. Diharapkan semua ASN yang membutuhkan layanan kepegawaian dapat terlayani dan administrasi kepegawaian yang dibutuhkan dapat terbit tepat waktu. Peningkatan pengembangan sistem kepegawaian diupayakan melalui pengembangan 4 aplikasi SIMPEG (sistem kepegawaian), SIMPEG DS (Simpeg yang terkoneksi dengan BKN), SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) dan MATA ASN (manajemen talenta ASN. Selanjutnya untuk peningkatan kedisiplinan diupayakan melalui pembinaan disiplin sebanyak 400 orang dan penyelesaian pelanggaran disiplin sebanyak 4 kegiatan.

Adapun rekapitulasi perubahan anggaran tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2025

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)		Selisih Dengan Penetapan		Alasan Perubahan
					Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						13,458,659,450	15,311,910,450	1,853,251,000	13.77	
5.03	KEPEGAWAIAN								-		
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8,441,484,700	9,274,296,330	832,811,630	9.87	
		Persentase capaian perencanaan dan keuangan	Persentase capaian perencanaan dan keuangan	Persen	100	100	6,959,565,000	6,972,416,000	12,851,000	0.18	
		Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian	Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian	Persen	100	100	1,481,919,700	2,301,880,330	819,960,630	55.33	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	9	16	22,577,000	58,092,000	35,515,000	157.31	
5.03.01.2..01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	3	4,705,000	10,090,000	5,385,000	114.45	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.01.2..01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	2,635,000	4,030,000	1,395,000	52.94	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.01.2..01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	3	2,465,000	11,230,000	8,765,000	355.58	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.01.2..01.0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	2,525,000	4,030,000	1,505,000	59.60	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.01.2..01.0005	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	3	2,825,000	10,730,000	7,905,000	279.82	Menyesuaikan kebutuhan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)		Selisih Dengan Penetapan		Alasan Perubahan
					Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.01.2..01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	laporan	1	2	4,267,000	5,460,000	1,193,000	27.96	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.01.2..01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	1	3	3,155,000	12,522,000	9,367,000	296.89	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen	1	2	6,936,988,000	6,914,324,000	- 22,664,000	- 0.33	
5.03.01.2..02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	12	6,935,011,000	6,910,044,000	- 24,967,000	- 0.36	Terdapat pegawai yang pensiun
5.03.01.2..02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	1	2	1,977,000	4,280,000	2,303,000	116.49	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	dokumen	3	1	188,660,000	99,800,000	- 88,860,000	- 47.10	
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	545	385	188,660,000	99,800,000	- 88,860,000	- 47.10	Efisiensi anggaran
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	paket	26	26	503,950,150	562,635,180	58,685,030	11.65	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	12	12	14,992,500	20,061,000	5,068,500	33.81	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12	12	168,030,050	168,380,800	350,750	0.21	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	2	2	25,887,600	15,022,000	- 10,865,600	- 41.97	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	4	4	20,010,000	20,550,000	540,000	2.70	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	4	4	6,095,000	24,300,000	18,205,000	298.69	Menyesuaikan kebutuhan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)		Selisih Dengan Penetapan		Alasan Perubahan
					Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/Berkurang (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	12	12	268,935,000	308,791,380	39,856,380	14.82	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	-	1	-	5,530,000	5,530,000	100	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	unit	14	113	144,607,550	346,917,550	202,310,000	139.90	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	14	113	144,607,550	346,917,550	202,310,000	139.90	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan	36	36	348,071,000	311,231,000	- 36,840,000	- 10.58	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	12	4,375,000	3,175,000	- 1,200,000	- 27.43	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	217,600,000	181,960,000	- 35,640,000	- 16.38	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	126,096,000	126,096,000	-	-	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	unit	86	86	296,631,000	981,296,600	684,665,600	230.81	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	9	9	114,860,000	148,220,000	33,360,000	29.04	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	27	27	51,220,000	51,220,000	-	-	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.01.2.09.0003	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	unit	1	1	29,985,000	39,241,600	9,256,600	30.87	Menyesuaikan kebutuhan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)		Selisih Dengan Penetapan		Alasan Perubahan
					Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	47	47	46,590,000	58,790,000	12,200,000	26.19	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	2	53,976,000	683,825,000	629,849,000	1,166.91	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						5,017,174,750	6,037,614,120	1,020,439,370	20.34	
		Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	Persen	3.20	3.62	2,933,142,490	3,224,800,940	291,658,450	9.94	
		Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya	Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya	Persen	3.48	3.48	615,246,860	841,699,460	226,452,600	36.81	
		Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi	Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi	Persen	100	100	334,841,220	275,035,670	- 59,805,550	- 17.86	
		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	Persen	8.08	8.08	263,528,800	957,460,880	693,932,080	263.32	
		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	Persen	100	100	390,736,060	330,888,750	- 59,847,310	- 15.32	
		Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan	Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan	Persen	100	100	314,682,900	291,977,400	- 22,705,500	- 7.22	
		Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	Persen	85	85	164,996,420	115,751,020	- 49,245,400	- 29.85	
5.03.02.2.01	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN						746,290,000	745,685,500	- 604,500	- 0.08	
		Jumlah laporan hasil fasilitasi pengadaan CASN	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengadaan CASN	Dokumen	2	2	342,384,100	354,331,200	11,947,100	3.49	
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pemberhentian ASN) yang terlayani tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pemberhentian ASN) yang terlayani tepat waktu	Dokumen	550	500	89,223,000	99,376,900	10,153,900	11.38	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian	Dokumen	5	5	314,682,900	291,977,400	- 22,705,500	- 7.22	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)		Selisih Dengan Penetapan		Alasan Perubahan
					Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Dokumen	2	2	69,966,400	33,105,400	- 36,861,000	- 52.68	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan ASN	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan ASN	Dokumen	2	2	272,417,700	321,225,800	48,808,100	17.92	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Dokumen	550	500	89,223,000	99,376,900	10,153,900	11.38	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Dokumen	4	4	135,397,500	137,340,000	1,942,500	1.43	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	Dokumen	1	1	96,133,000	60,774,000	- 35,359,000	- 36.78	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi data, informasi, dan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	Dokumen	2	2	83,152,400	93,863,400	10,711,000	12.88	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						423,096,000	1,076,009,520	652,913,520	154.32	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN	Dokumen	7	6	263,528,800	957,460,880	693,932,080	263.32	
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat) yang terlayani tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat) yang terlayani tepat waktu	Dokumen	6	6	159,567,200	118,548,640	- 41,018,560	- 25.71	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	4	4	101,088,400	120,260,980	19,172,580	18.97	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Dokumen	6	6	159,567,200	118,548,640	- 41,018,560	- 25.71	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Dokumen	3	2	162,440,400	837,199,900	674,759,500	415.39	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.02.2.03	Pengembangan kompetensi ASN						3,318,005,350	3,805,232,300	487,226,950	14.68	
		Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya	Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya	orang	348	394	2,820,680,040	2,924,234,980	103,554,940	3.67	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)		Selisih Dengan Penetapan		Alasan Perubahan
					Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah ASN yang telah mengikuti uji kompetensi dan potensi	Jumlah ASN yang telah mengikuti uji kompetensi dan potensi	orang	120	120	112,462,450	300,565,960	188,103,510	167.26	
		Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya	Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya	orang	100	100	272,862,760	487,368,260	214,505,500	78.61	
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, pengembangan karir jabatan fungsional) yang terlayani tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, pengembangan karir jabatan fungsional) yang terlayani tepat waktu	orang	19	19	112,000,100	93,063,100	- 18,937,000	- 16.91	
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	orang	348	394	2,695,827,700	2,795,145,460	99,317,760	3.68	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan assesment center	Jumlah dokumen pengelolaan assesment center	Jumlah dokumen pengelolaan assesment center	Dokumen	1	1	112,462,450	300,565,960	188,103,510	167.26	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapat pendidikan lanjutan	Jumlah ASN yang mendapat pendidikan lanjutan	orang	100	100	272,862,760	487,368,260	214,505,500	78.61	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Dokumen	3	3	124,852,340	129,089,520	4,237,180	3.39	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan jabatan fungsional ASN	Jumlah ASN fungsional yang dibina	Jumlah ASN fungsional yang dibina	orang	280	80	112,000,100	93,063,100	- 18,937,000	- 16.91	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						529,783,400	410,686,800	- 119,096,600	- 22.48	
		Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja ASN	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja ASN	Dokumen	4	4	153,713,300	109,388,700	- 44,324,600	- 28.84	
		Jumlah pegawai yang mendapat penghargaan dan tanda jasa	Jumlah pegawai yang mendapat penghargaan dan tanda jasa	Orang	2316	2487	181,127,920	165,646,970	- 15,480,950	- 8.55	
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (ijin perceraian) yang terlayani tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (ijin perceraian) yang terlayani tepat waktu	Dokumen	10	18	29,945,760	19,900,110	- 10,045,650	- 33.55	
		Jumlah dokumen pengelolaan disiplin ASN	Jumlah dokumen pengelolaan disiplin ASN	Dokumen	4	4	164,996,420	115,751,020	- 49,245,400	- 29.85	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	4	4	153,713,300	109,388,700	- 44,324,600	- 28.84	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	orang	2306	2477	151,482,920	147,165,470	- 4,317,450	- 2.85	Menyesuaikan kebutuhan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)		Selisih Dengan Penetapan		Alasan Perubahan
					Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	orang	10	10	29,645,000	18,481,500	- 11,163,500	- 37.66	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	orang	400	400	114,996,420	86,485,820	- 28,510,600	- 24.79	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Laporan	4	4	50,000,000	29,265,200	- 20,734,800	- 41.47	Menyesuaikan kebutuhan
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan proses izin perceraian pegawai	Jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani	Jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani	Dokumen	10	18	29,945,760	19,900,110	- 10,045,650	- 33.55	Menyesuaikan kebutuhan

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025 ini adalah :

1. Perubahan Renja BKB Kabupaten Pemalang Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025.
2. Perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat sifatnya masih **indikatif** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD, Renstra PD dan Renja PD ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang dan UPT Penilaian Kompetensi secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKAP maupun DPPA untuk tahun 2025.

Pemalang, 19 Agustus 2025
Kepala BKD Kabupaten Pemalang



EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

Pemalang, 19 Agustus 2025

Kepala BKD Kabupaten Pemalang



IKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Rencana Kerja
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan penyusunan agenda kerja	v			
2	Pengolahan data dan informasi	v			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	v			
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan triwulan I berdasarkan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	v			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	v			
6	Penelaahan Penetapan Renja Perangkat Daerah	v			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	v			
8	Penelaahan usulan masyarakat		v	Tidak ada usulan dari masyarakat	
9	Perumusan kegiatan prioritas	v			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota		v	Tidak melaksanakan forum perangkat daerah	
10a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan		v	Tidak ada usulan hasil Musrenbang Kecamatan	
10b	Mempertajam indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	v			
10c	Mensikronkan program, kegiatan dan sub kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaannya	v			
10d	Menyesuaikan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota	v			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	v			
12	Program, kegiatan dan sub kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota selaras dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota		v	Tidak melaksanakan forum perangkat daerah	
13	Pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	v			
14	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan	v			

Pemalang, 19 Agustus 2025
Kepala BKD Kabupaten Pemalang



EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 188.4 /05/ TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029,
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2026, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a dan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan persiapan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah diawali dengan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026, Dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang;
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menginterpretasikan visi, misi, dan RPJMD ke dalam tujuan dan sasaran BKD Kabupaten Pematang serta menyusun arah kebijakan dan strategi program BKD Kabupaten Pematang yang mendukung pencapaian RPJMD;
- b. Menghimpun dan menganalisis dokumen, data dan informasi pendukung untuk perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka penyusunan Renstra BKD Kabupaten Pematang Tahun 2025-2029, Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2026 dan Perubahan Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2025;
- c. Menerjemahkan target tahunan Renstra BKD Kabupaten Pematang ke dalam Renja tahun 2026;
- d. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
- e. Merumuskan dan menyusun dokumen Renstra BKD Kabupaten Pematang Tahun 2025-2029, Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2026, dan Perubahan Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melakukan pengendalian kebijakan Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2026 dan Perubahan Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2025.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 8 Januari 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 188.4/ 05 /TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029, RENCANA
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2026, DAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2025

SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029,
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2026, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

NO	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Pengarah	
3.	Kasubag Bina Program dan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Ketua	
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
5.	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
6.	Kabid Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
7.	Kabid Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
8.	Kabid Disiplin dan Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
9.	Kepala Unit Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	

NO	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
10.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang	Anggota	Riri Setiyowati, S.E., M.M.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR: 100.3.3.2/182/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029,
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026, DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a dan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan persiapan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah diawali dengan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menginterpretasikan visi, misi, dan RPJMD ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah serta menyusun arah kebijakan dan strategi program perangkat daerah yang mendukung pencapaian RPJMD;
- b. menghimpun dan menganalisis dokumen, data, dan informasi pendukung untuk perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menerjemahkan target tahunan Renstra Perangkat Daerah ke dalam Renja tahun 2026;
- d. mengintegrasikan hasil musrenbang dan pokok pikiran DPRD yang relevan dengan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah;

- e. melakukan harmonisasi Renja antar Perangkat Daerah melalui Forum Perangkat Daerah;
- f. merumuskan dan menyusun dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 26 Mei 2026

BUPATI PEMALANG,



ANOM WIDIYANTORO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR: 100.3.3.2/182/TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2029, RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026,
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029, RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026,
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris Daerah
2.	Wakil Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Keuangan
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Tata Usaha 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Program Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	
	a. Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Program Perekonomian dan Pembangunan	
	a. Ketua	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	a. Ketua	Kepala Bagian Organisasi
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3. Kepala Subbagian Protokol 4. Pejabat Fungsional/Pelaksana

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris DPRD
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Program dan Keuangan
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan 2. Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat 3. Kepala Subbagian Keuangan 4. Kepala Subbagian Tata Usaha 5. Pejabat Fungsional/Pelaksana

3. INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Inspektur
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Umum
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
	b. Anggota	1. Subkoordinator Perencana dan Bina Program 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penyelenggaraan Pengawasan	
	a. Ketua	Inspektur Pembantu I
	b. Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah II 2. Auditor 3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUD) 4. Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
	a. Ketua	Inspektur Pembantu Wilayah III
	b. Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah Khusus 2. Auditor 3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUD) 4. Pelaksana

4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Keuangan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 2. Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Dan Masyarakat 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Sekolah Dasar 2. Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Sarana Prasarana	
	a. Ketua	Kepala Bidang Sarana Prasarana
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, dan Kemasyarakatan 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Mutasi Tenaga Pendidik 2. Kepala Seksi Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Bidang Kebudayaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kebudayaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional

5. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemuda dan Olah Raga	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Unit Pengelola Objek Wisata	
	a. Ketua	Kepala Unit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

6. DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Kesehatan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kesehatan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

7. DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Rehabilitasi Sosial	
	a. Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja V Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

9. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penataan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Penataan Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

10. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
	Anggota	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Pelaksana

11. DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program Dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja III Bidang Koperasi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Koperasi
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perdagangan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perdagangan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Perindustrian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perindustrian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

12. DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
	a. Ketua	Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

13. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Statistik dan Persandian	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

14. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Sumber Daya Air	
	a. Ketua	Kepala Bidang Sumber Daya Air
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Bina Marga	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bina Marga
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya, dan Tata Ruang	
	a. Ketua	Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya, dan Tata Ruang
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

15. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perumahan dan Pertanahan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kawasan Permukiman	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

16. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Angkutan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Angkutan
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Angkutan Penumpang dan Barang 2. Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Keselamatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Lalu Lintas	
	a. Ketua	Kepala Bidang Lalu Lintas
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

17. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas	
	a. Ketua	Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

18. DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Ketahanan Pangan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	a. Ketua	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perkebunan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Perkebunan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
8.	Kelompok Kerja V Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

19. DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

20. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perpustakaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perpustakaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Arsip	
	a. Ketua	Kepala Bidang Arsip
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

21. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Satpol PP
2.	Wakil Ketua	Sekretaris

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan 2. Kepala Seksi Pengawasan, Penegakan dan Penindakan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perlindungan dan Pemadam Kebakaran	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemadam Kebakaran
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Satuan Perlindungan dan Bina Potensi Masyarakat 2. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

22. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Unit Penelitian dan Pengembangan	
	a. Ketua	Kepala Unit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

23. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Anggaran	
	a. Ketua	Kepala Bidang Anggaran
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran 2. Kepala Subbidang Evaluasi dan Penyusunan Anggaran 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Perbendaharaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perbendaharaan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Penatausahaan Pencarian Dana 2. Kepala Subbidang Penatausahaan Bendahara Umum Daerah 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Akutansi dan Aset Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Akutansi Dan Aset Daerah
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Akuntansi dan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Pelaporan 2. Kepala Subbidang Aset Daerah 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

24. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pelayanan dan Penataan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pelayanan dan Penataan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya 2. Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengolahan Data dan Penetapan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Penetapan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Analisa, Pengembangan dan Pengolahan Data 2. Kepala Subbidang Penetapan, Verifikasi dan Keberatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Penagihan dan Pengendalian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Penagihan dan Pengendalian
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Penyuluhan dan Penagihan 2. Kepala Subbidang Pengendalian dan Pelaporan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

25. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Mutasi dan Promosi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Mutasi dan Promosi
	b. Anggota	Jabatan Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengembangan Aparatur	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Pengembangan Aparatur
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Unit Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur	
	a. Ketua	Kepala Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Sekretaris	Kepala Pelaksana
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
	b. Anggota	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kedaruratan dan Logistik	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

27. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Kesatuan Bangsa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
7.	Kelompok Kerja V Unit Pelaksana Teknis Daerah	
	a. Ketua	Kepala UPTD
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

28. KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

29. KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

30. KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

31. KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

32. KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

33. KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

34. KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman Dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

35. KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

36. KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Pelayanan

37. KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

38. KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

39. KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

40. KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat

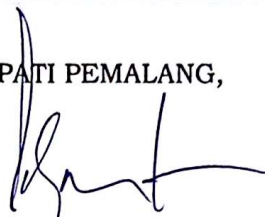
NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

41. KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

BUPATI PEMALANG,






ANOM WIDIYANTORO

BERITA ACARA
VERIFIKASI PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH RUMPUN BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah
Tanggal : 14 Agustus 2025

Hasil verifikasi perubahan rencana kerja tahun 2025 Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Badan Kepegawaian Daerah) adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, terdiri dari:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup
2. Bab I
 - Mohon tambahkan sebagai dasar hukum Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
 - Mohon tambahkan sebagai dasar hukum Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
 - Belum memuat Prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 yang diarahkan pada Percepatan Pembangunan melalui Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Inovasi dan Teknologi untuk Meningkatkan Perekonomian dan Daya Saing Daerah.
3. Bab II
 - Bila capaian indikator kinerja sudah melebihi target tahun berjalan, maka target tahun selanjutnya untuk disesuaikan lebih optimis.
4. Bab III
 - Mohon tambahkan substansi narasi program, kegiatan dan sub kegiatan terkait alasan perubahan anggaran beserta targetnya.
5. Bab IV
 - Sudah lengkap
6. Mohon disusun softfile perubahan rencana kerja tahun 2025 dalam bentuk satu file pdf.

VERIFIKATOR	
1. Rizki Novitasari, S.I.Kom,MM	
2. Nurhayati, S.E.	
3. Cicik Nureliyanti, S.Stat	
4. Handini Kartikasami, S.Pd.	